

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*. UU Nomor 5 Tahun 1960. LN No. 104 Tahun 1960. TLN No. 2043.

_____. *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*, UU Nomor 23 Tahun 2014, LN No. 224 Tahun 2014, TLN No. 5587.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah*. PP Nomor 18 Tahun 2021.

_____. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*. Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020.

_____. *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*, Perda Nomor 12 Tahun 2016.

_____. *Peraturan Bupati Bogor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah*. Perbup Nomor 89 Tahun 2020.

_____. *Peraturan Bupati Bogor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Perbup Nomor 41 Tahun 2019.

- _____ . *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Perda Nomor 2 Tahun 2020.*
- _____ . *Peraturan Bupati Bogor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan. Perbup Nomor 94 Tahun 2020.*
- _____ . *Peraturan Bupati Bogor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, Perbup Nomor 57 Tahun 2020.*
- _____ . *Keputusan Kepala BPN Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003.*
- _____ . *Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Keputusan kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007.*

B. Buku

Basuki Rekso, Basuki Wibowo. *Penyelesaian Sengketa Alternatife*. Surabaya : Airlangga University Press, 2004.

Chualaemi, Achmad. *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*. Semarang : Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP, 1992.

Darmodihardjo, Dardji dan Shidarta. *Pokok-pokok filsafat hukum , apa dan bagaimana filsafat hukum di Indonesia*. Jakarta : Gramedia pustaka utama, 1995.

Hajati, Sri. *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2022.

Harahap, Yaya. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem peradilan dan penyelesaian sengketa*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan : Jakarta, 2008.

Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan, 1999.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011.

Ketut, I Oka Setiawan. *Hukum Agraria*. Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2021.

Leks, Eddy M. *Panduan Praktis Hukum Properti Memahami Problematika Hukum Pertanahan, Perumahan, serta Pengembangannya*. Jakarta : Gramedia Pusaka Utama, 2016.

Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2000.

Maria, SW Sumardjono dan Nurhasan Ismail. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta : Kompas Gramedia, 2008.

Maru, Sophar Hutagalung. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada, 2010.

Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.

C. LAIN-LAIN

Abdullah, Dudung. "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah". *Jurnal Hukum Positum* Vol 1, No. 1. 8 Desember 2016.

Farid, Reza. "Staff Bidang fasilitasi penyelesain sengketa di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor". *Wawancara* di ruangan Bagian Pertanahan di DPKPP Bogor. 30 Maret 2023.

Gita, Irawan. Sengketa agraria jadi salah satu tantangan penegakan HAM di Indonesia tahun 2018, tersedia di : <http://www.tribunnews.com>, diakses tanggal 25 Januari 2023, pukul 10:00 WIB.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan Tahun 2011, hlm. 2.

Mujiarto, Eko. Kepala Bidang Pertanahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. *Wawancara* di ruangan Bagian Pertanahan di DPKPP Bogor. 31 Maret 2023.

Nadir, Sakinah, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa" *JPP (Jurnal Politik Profetik)*. Vol. 1, no. 1 2013.

Portal resmi Kabupaten Bogor, "Letak Geografis", Tersedia di <http://bogorkab.go.id>, di akses tanggal 23 Maret 2023.

Rahmat Ramdahani, "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha Pt.Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap". *Jurnal Seminar Nasional Teknologi Dan Humaniora* 2021, Ke-1.

Satory, Agus. "Pemberdayaan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Serta Berkepastian Hukum". *Disertasi* pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2022.